

**PELAKSANAAN SISTEM KOLONIAL LIBERAL DI
PALEMBANG 1870 – 1900**

SKRIPSI

Oleh:

ALMAR HAZIZAH

NIM 352022010



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**PELAKSANAAN SISTEM KOLONIAL LIBERAL DI
PALEMBANG 1870 – 1900**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Muhammadiyah Palembang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Pendidikan**

Oleh:

**ALMAR HAZIZAH
NIM 352022010**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh Almar Hazizah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Palembang, 27 Juni 2026

Pembimbing I



Dra. Nurhayati, M.Pd.

Palembang, 27 Juni 2026

Pembimbing II



Wendy Anugrah Octavian, S.Pd., M.Pd

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh Almar Hazizah telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 30 Juni 2026

Dewan Penguji



Dra. Nurhayati, M.Pd.,

Ketua



Wendy Anugrah Octavian, S.Pd., M.Pd.,

Anggota



Yusinta Tia Rusdiana, S.Pd., M.Pd.,

Anggota

Mengetahui
Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah



Dr. Apriana, M.Hum
NIDN. 02040480006

Mengetahui
Dekan FKIP UMP



Prof Dr. Indawan, M.Pd.
NIDN. 0023036701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almar Hazizah
Nim : 352022010
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Telp/HP : 0895420165511

Menyatakan bahwa skripsi berjudul

“Pelaksanaan Sistem Kolonial Liberal di Palembang 1870-1900”

Berserta seluruh isinya adalah merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan -aturan etika keilmuan dalam masyarakat ilmiah.

Atas pernyataan ini, saya siap menerima segala sanksi yang berlaku atau yang ditetapkan untuk itu, apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi saya.

Palembang Juni 2026

Yang bersangkutan



Almar Hazizah
NIM. 352022010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ *Cukuplah Allah menjadi Penolong serta sebaik-baik Pelindung (QS. Ali 'Imran [3]: 173)*
- ❖ *"Hasbunallah wanikmal wakil" (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."*
- ❖ *Doubt Mills more dreams than failure ever Will.*
- ❖ *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyirah: 6)*

PERSEMBAHAN:

Lembaran ini menjadi saksi atas setiap rintangan yang berhasil dilalui, doa yang terus dipanjatkan dan asa yang akhirnya terwujud. Dengan memanjatkan puji dan syukur yang tiada tara ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kekuatan, kesabaran dan petunjuk dalam setiap langkah penulis. Di bawah payung rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penulis mempersembahkan karya tulis persembahan akhir masa studi ini dengan penuh takzim, cinta dan rasa syukur kepada:

1. *Ibunda tercinta, Hj. Yuniar, yang tak pernah lelah berjuang mencari nafkah demi anaknya. Sosok yang tidak pernah mengeluh bahkan dalam keadaan sulit sekalipun serta selalu mengajarkan arti kehidupan, perjuangan dan kekuatan kepada penulis. Terima kasih Bunda, atas segala doa, semangat dan dukungan yang selalu mengalir. Berdirinya penulis di titik ini bukanlah karena kehebatan diri sendiri, melainkan karena kehebatan Bunda yang luar biasa. Tentunya ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa sepasang kaki seorang ibu tunggal, yang melangkah dengan doa dan air mata, mampu mengantarkan anaknya berdiri tegak di puncak keberhasilan.*

2. *Almarhum Om M. Rusdi Anwar, yang kehadirannya telah mengisi kekosongan sosok seorang ayah. Kasih sayang dan teladanmu akan tetap hidup dalam setiap langkah penulis.*
3. *Saudara-saudaraku tercinta (Rosi Rostian, Anggela Tarisa, S.Pd. dan Nada Aulia), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta doa di sepanjang perjalanan ini.*
4. *Ibu Dra. Nurhayati M.Pd. dan Bapak Wendy Anugrah Octavian S.Pd, M.Pd., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan serta masukan berharga hingga skripsi ini dapat terselesaikan.*
5. *Pengelola Beasiswa KIP-Kuliah, yang telah memberikan kepercayaan, dukungan finansial dan kesempatan besar kepada penulis untuk menempuh pendidikan tinggi.*
6. *Sahabat dan teman-teman terdekat, yang selalu menjadi tempat bersandar, pemberi semangat dan penguat bagi penulis hingga mampu menyelesaikan masa studi ini.*
7. *Teman-teman Angkatan 2022 Pendidikan Sejarah, terima kasih atas ilmu, cerita, tawa dan kebersamaan yang membuat perjalanan kuliah ini menjadi sangat berarti.*
8. *Almamater kebanggaan, Universitas Muhammadiyah, tempat penulis menimba ilmu dan bertumbuh.*
9. *Diriku sendiri, terima kasih karena tidak pernah menyerah pada keadaan. Terima kasih telah berjuang sejauh ini walau harus melewati banyak air mata. Hari ini adalah langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar.*

ABSTRAK

Hazizah, Almar. 2026. *Pelaksanaan Sistem Kolonial Liberal di Palembang Tahun 1870–1900*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pembimbing: (1) Dra. Nurhayati, M.Pd. (2) Wendy Anugrah Octavian, S.Pd., M.Pd.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Sistem Kolonial Liberal di Palembang Tahun 1870–1900. **Rumusan masalah** dalam penelitian ini adalah: (1) Apa yang melatarbelakangi diberlakukannya sistem kolonial liberal di Palembang? (2) Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah kolonial dalam membuka investasi swasta di Palembang? (3) Bagaimana peran pemerintah kolonial dan elite lokal dalam pelaksanaan sistem kolonial liberal di Palembang? (4) Bagaimana dampak pelaksanaan sistem kolonial liberal terhadap kehidupan politik, ekonomi dan sosial masyarakat Palembang? **Jenis penelitian** yang digunakan adalah studi kepustakaan. **Metode** yang digunakan adalah metode historis yang meliputi tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur sejarah, arsip kolonial serta kajian ilmiah yang relevan dengan perkembangan kolonialisme liberal di Sumatera Selatan. Proses analisis dilakukan dengan menafsirkan fakta-fakta sejarah secara kritis untuk melihat hubungan sebab akibat dalam perkembangan sistem kolonial liberal di Palembang. **Kesimpulan** menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang diberlakukannya sistem kolonial liberal di Palembang tidak terlepas dari perubahan kebijakan ekonomi pemerintah Belanda setelah mendapat berbagai kritik terhadap pelaksanaan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*). Pemberlakuan *Agrarische Wet 1870* menjadi dasar hukum bagi masuknya modal swasta ke Hindia Belanda, termasuk Palembang. Selain itu, potensi sumber daya alam yang melimpah, letak geografis yang strategis serta keberadaan jaringan Sungai Musi sebagai jalur transportasi utama menjadikan Palembang sebagai wilayah yang menarik bagi pengembangan investasi swasta dan perkebunan kolonial. (2) Bentuk kebijakan pemerintah kolonial terhadap pembukaan investasi swasta di Palembang diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang luas kepada perusahaan-perusahaan swasta Eropa untuk menyewa dan mengelola lahan dalam jangka panjang. Kebijakan tersebut didukung oleh penerapan *Agrarische Wet 1870*, pembenahan administrasi kolonial serta pembangunan sarana transportasi yang bertujuan memperlancar kegiatan ekonomi kolonial. Melalui kebijakan ini, Palembang semakin terintegrasi ke dalam sistem ekonomi kolonial yang berorientasi pada pasar dunia. (3) Peran pemerintah kolonial dan elite lokal dalam mendukung sistem kolonial liberal sangat penting dalam menjaga keberlangsungan kebijakan tersebut. Pemerintah kolonial melalui residen, asisten *residen* dan kontrolir berfungsi mengawasi administrasi, keamanan serta pelaksanaan kebijakan ekonomi di daerah. Sementara itu, elite lokal seperti pasirah, demang, kerio dan tokoh adat dimanfaatkan sebagai perantara antara pemerintah kolonial dengan masyarakat. Kerja sama tersebut memudahkan pemerintah kolonial dalam mengendalikan wilayah, mengawasi masyarakat serta mendukung kepentingan investasi swasta. (4) Dampak dari Pelaksanaan sistem kolonial liberal terhadap kehidupan masyarakat Palembang yaitu *dalam bidang politik*, kekuasaan kolonial semakin kuat melalui perluasan struktur birokrasi hingga ke daerah pedalaman sehingga otonomi lokal semakin terbatas. *Dalam bidang ekonomi*, berkembangnya perkebunan dan masuknya modal swasta meningkatkan aktivitas perdagangan dan produksi komoditas ekspor, namun keuntungan terbesar tetap dinikmati oleh pemerintah kolonial dan pengusaha Eropa. *Dalam bidang sosial*, muncul perubahan struktur masyarakat yang ditandai dengan lahirnya kelompok sosial baru seperti buruh perkebunan, mandor, pedagang perantara dan pegawai administrasi kolonial. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa sistem kolonial liberal tidak hanya mengubah perekonomian Palembang, tetapi juga merekonstruksi kehidupan sosial dan politik masyarakat secara menyeluruh. **Saran** dalam penelitian ini adalah bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai sejarah kolonial di Palembang.

Kata Kunci: Kolonial, Liberal, Palembang.

ABSTRACT

Hazizah, Almar. 2026. *The Implementation of the Liberal Colonial System in Palembang, 1870–1900*. Undergraduate Thesis, History Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Palembang. Advisors: (1) Dra. Nurhayati, M.Pd. (2) Wendy Anugrah Octavian, S.Pd., M.Pd.

This study aimed to examine the implementation of the Liberal Colonial System in Palembang from 1870 to 1900. The research problems are: (1) What were the factors behind the implementation of the Liberal Colonial System in Palembang? (2) What policies did the colonial government adopt to promote private investment in Palembang? (3) What roles did the colonial government and local elites play in implementing the Liberal Colonial System? (4) What were the political, economic, and social impacts of the Liberal Colonial System on the people of Palembang? This study employed library research using the historical method, including heuristics, verification, interpretation, and historiography. The data were obtained from historical literature, colonial archives, and relevant scholarly works. The data were analyzed through a critical interpretation of historical facts to identify causal relationships in the development of the Liberal Colonial System in Palembang. The results show that: (1) the implementation of the Liberal Colonial System in Palembang was influenced by changes in Dutch economic policy following criticism of the Cultivation System (*Cultuurstelsel*). The Agrarian Law of 1870 (*Agrarische Wet*) became the legal basis for the entry of private capital into Palembang, supported by its abundant natural resources, strategic location, and the Musi River transportation network. (2) The colonial government encouraged private investment by granting European companies long-term land leases, supported by the Agrarian Law of 1870, administrative reforms, and transportation development. (3) The colonial government and local elites played important roles in implementing the policy. Colonial officials supervised administration and security, while local leaders acted as intermediaries between the government and society. (4) The Liberal Colonial System strengthened colonial political control, expanded plantations and export trade, and created new social groups, including plantation laborers, foremen, intermediary traders, and colonial administrative employees. Overall, the system transformed the political, economic, and social life of Palembang. This study is expected to broaden readers' understanding of the history of colonialism in Palembang.

Keywords: *Colonialism, Liberalism, Palembang*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Sistem Kolonial Liberal di Palembang Tahun 1870–1900*. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat mendapat gelar sarjana Pendidikan (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis rasakan dapat mengatasinya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Indawan Syahri M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Dr. Apriana M.Hum., Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Dra. Nurhayati M.Pd., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Wendy Anugrah Octavian S.Pd, M.Pd., Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, saran dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibunda tercinta serta keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari kekurangan dan kekeliruan, seperti pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, demikian juga penulis tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, dengan ketulusan hati penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dalam skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengajaran biologi dan studi pendidikan sejarah dan masyarakat pada umumnya.

Palembang, 22 Juni 2026

Almar Hazizah
NIM.352022010

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	Error! Bookmark not defined.
<i>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</i>	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat penelitian	12
F. Definisi Istilah	13
BAB II	17
KAJIAN PUSTAKA	17
A. Kajian Teori	17
1. Teori Kolonialisme	17
2. Faktor-Faktor Pendorong Kolonialisme	21
3. Bentuk Kolonialisme Di Wilayah Jajahan	25
4. Dampak Kolonialisme di Wilayah Jajahan	28
5. Teori Sistem Kolonial Liberal	30
6. Latar Belakang Munculnya Sistem Kolonial Liberal	33
7. Dampak Sistem Kolonialisme Liberal	36
B. Kajian Relevan	39
BAB II	46
METODE PENELITIAN	46
A. Metode Penelitian	46
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
1. Pendekatan Penelitian	49
2. Pendekatan Historis	50
3. Pendekatan Ekonomi	51
4. Pendekatan Geografi	52
5. Pendekatan Politik	53
6. Pendekatan Militer	54
7. Pendekatan Sosiologi	55
C. Jenis Penelitian	56

D. Lokasi Penelitian.....	56
E. Kehadiran Penelitian	57
F. Sumber Data	57
1. Sumber Primer	58
2. Sumber Sekunder	59
G. Teknik Pengumpulan Data	59
1. Studi Kepustakaan.....	60
2. Dokumentasi	61
H. Teknik Analisa Data	62
1. Kritik Sumber (<i>Verifikasi</i>).....	62
2. Kritik Eksternal	63
3. Kritik internal	63
4. Interpretasi	64
5. Historiografi	65
I. Tahap-tahap Penelitian.....	66
BAB II.....	69
PEMBAHASAN	69
A. Latar Belakang Diberlakukannya Sistem Kolonial Liberal di Palembang 1870-1900.	69
B. Bentuk Kebijakan Pemerintah Kolonial terhadap Pembukaan Investasi Swasta di Palembang.....	74
C. Peran Pemerintah Kolonial dan Elite Lokal dalam Mendukung Sistem Liberal di Palembang.....	78
D. Dampak Pelaksanaan Sistem Liberal terhadap Kehidupan Politik, Ekonomi dan Sosial Masyarakat Palembang.....	82
BAB V	89
PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	91
DAFTAR RUJUKAN	92
LAMPIRAN.....	102
RIWAYAT HIDUP	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti.....	43
Lanjutan tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti	47
Lanjutan tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti	48
Tabel 3. 1 Tahap-Tahap Penelitian.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penambangan Batu Bara Bukit Asam	99
Gambar 2. Pabrik pengasapann karet di Tabenan	99
Gambar 3. Kilang Minyak di Plaju	100
Gambar 4. Sungai Musi tahun ±1900	100
Gambar 5. Tokoh Liberal Johan Rudolf Thorbecke	101
Gambar 6. Tokoh liberal Isaäc Fransen van de Putte	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Usul Judul	104
Lampiran 2. Sk Pembimbing Proposal	105
Lampiran 3. Sk Pembimbing Skripsi	106
Lampiran 4. Lembar Bimbingan	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) merupakan salah satu kebijakan ekonomi kolonial yang paling penting dalam sejarah pemerintahan Belanda di Hindia Belanda pada abad ke-19. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch sebagai langkah strategis untuk memulihkan kondisi keuangan Kerajaan Belanda yang saat itu sedang mengalami krisis berat. Krisis tersebut disebabkan oleh tingginya biaya yang dikeluarkan Belanda selama Perang Diponegoro (1825–1830) serta dampak politik dan ekonomi dari pemisahan Belgia pada tahun 1830. Dalam kondisi tersebut, Hindia Belanda dipandang sebagai sumber pemasukan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal guna menyelamatkan perekonomian negeri induk.

Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa ini mewajibkan penduduk pribumi untuk menyerahkan seperlima tanah pertaniannya guna ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, tembakau dan teh. Apabila masyarakat tidak memiliki tanah yang memadai, Masyarakat tersebut diwajibkan menggantinya dengan kerja paksa selama kurang lebih enam puluh hari dalam setahun untuk kepentingan pemerintah kolonial. Hasil produksi tersebut harus diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan secara sepihak. Dengan demikian, petani tidak memiliki kebebasan untuk menentukan jenis tanaman, harga jual, maupun distribusi hasil panennya.

Menurut Sartono Kartodirdjo bahwa: “sistem tanam paksa pada hakikatnya merupakan bentuk eksploitasi ekonomi kolonial yang memanfaatkan tenaga, tanah dan sumber daya masyarakat pribumi untuk kepentingan negara kolonial” (Kartodirdjo, 1992: 68). Sistem ini bukan sekadar kebijakan pertanian, melainkan mekanisme penghisapan ekonomi yang terstruktur dan sistematis. Pemerintah kolonial memanfaatkan struktur sosial tradisional melalui para bupati, wedana dan kepala desa sebagai perantara untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya.

Pelaksanaan sistem tanam paksa melibatkan birokrasi kolonial dan elite pribumi secara langsung. Para pejabat lokal diberi tanggung jawab untuk memastikan target produksi tercapai sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dalam praktiknya, tekanan terhadap masyarakat sering kali jauh melampaui ketentuan resmi. Banyak petani dipaksa menyerahkan tanah lebih dari seperlima bagian, sementara waktu kerja yang seharusnya terbatas sering kali berlangsung jauh lebih lama. Situasi ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan kolonial bekerja melalui kolaborasi antara aparat Eropa dan elite lokal.

Walaupun sistem ini berhasil memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Belanda, dampaknya bagi masyarakat pribumi sangatlah berat. Kewajiban menanam tanaman ekspor sering kali mengurangi lahan untuk tanaman pangan, sehingga menimbulkan kelaparan dan kemiskinan di berbagai daerah. Beban kerja yang tinggi, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat lokal, serta praktik korupsi semakin memperparah penderitaan rakyat. Hasan Djafar Sjamsuddin menjelaskan bahwa: "*cultuurstelsel* menjadikan masyarakat pribumi sebagai alat produksi dalam sistem ekonomi kolonial yang sangat menguntungkan Belanda, tetapi merugikan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia" (Sjamsuddin, 2012: 97).

Dengan demikian, keberhasilan finansial Belanda pada abad ke-19 sesungguhnya dibangun di atas penderitaan rakyat pribumi. Pendapatan besar yang diperoleh dari Hindia Belanda tidak sebanding dengan kerugian sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat kolonial. Situasi inilah yang kemudian memunculkan berbagai kritik, baik di Hindia Belanda maupun di negeri Belanda sendiri. Berakhirnya sistem tanam paksa pada pertengahan abad ke-19 merupakan salah satu titik balik penting dalam sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Selama beberapa dekade, *cultuurstelsel* telah menjadi tulang punggung perekonomian kolonial. Namun, keberhasilan ekonomi tersebut justru menimbulkan kritik tajam karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip ekonomi modern. M.C. Ricklefs menyatakan bahwa: "*cultuurstelsel* tidak hanya memperkaya Belanda, tetapi juga memperlihatkan wajah eksploitasi kolonial yang paling nyata di Hindia

Belanda “(Ricklefs, 2008: 232). Sistem ini dianggap sebagai bentuk dominasi negara yang terlalu besar dalam aktivitas ekonomi, sekaligus sebagai simbol penindasan terhadap masyarakat jajahan.

Kritik terhadap *cultuurstelsel* semakin menguat setelah terbitnya buku *Max Havelaar* karya Eduard Douwes Dekker dengan nama penulis Multatuli pada tahun 1860. Karya ini membuka mata masyarakat Belanda terhadap berbagai penyimpangan, korupsi dan penderitaan rakyat pribumi akibat kebijakan kolonial. Melalui karya tersebut, opini publik di Belanda mulai berubah dan menuntut adanya reformasi dalam pengelolaan wilayah kolonial.

Taufik Abdullah dalam bukunya *Sejarah Lokal di Indonesia* menjelaskan bahwa :

Kritik intelektual dan tekanan opini publik di Belanda turut menggugah kesadaran politik, sehingga sistem tanam paksa dipandang tidak lagi sejalan dengan nilai moral masyarakat Eropa modern. Seiring dengan meningkatnya tekanan moral dan politik tersebut, pemerintah Belanda mulai mempertimbangkan perlunya reformasi besar dalam pengelolaan wilayah kolonialnya. Kritik tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga politis dan ekonomis. Kaum liberal di Belanda menilai bahwa monopoli negara melalui sistem tanam paksa telah menghambat perkembangan kapitalisme modern dan membatasi peluang investasi swasta di wilayah kolonial (Abdullah, 1987: 44).

Revolusi industri merupakan perubahan besar dalam sistem produksi yang ditandai oleh peralihan dari penggunaan tenaga manusia dan alat-alat tradisional menuju pemanfaatan mesin serta teknologi modern dalam kegiatan ekonomi. Menurut Sartono Kartodirdjo bahwa revolusi industri adalah “proses transformasi ekonomi yang mengubah struktur masyarakat agraris menjadi masyarakat industri melalui penggunaan mesin, perkembangan pabrik dan penerapan sistem produksi massal” (Kartodirdjo, 1993: 87). Sementara itu, Deliar Noer menjelaskan bahwa “revolusi industri merupakan tonggak perubahan peradaban modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, perluasan perdagangan, serta lahirnya kapitalisme industri di Eropa” (Noer, 1983: 52). Perubahan tersebut membawa dampak yang luas, tidak hanya pada bidang ekonomi, tetapi juga pada bidang sosial, politik dan hubungan antar negara.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa revolusi industri merupakan proses perubahan mendasar yang mengubah sistem produksi tradisional menjadi sistem produksi modern berbasis mesin. Perubahan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri, tetapi juga membawa transformasi besar dalam struktur sosial, politik serta hubungan internasional. Dengan demikian, revolusi industri menjadi salah satu tonggak utama lahirnya masyarakat modern dan berkembangnya sistem kapitalisme di Eropa.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, paham liberalisme muncul sebagai ideologi yang menekankan kebebasan individu, persaingan bebas serta pembatasan campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi. Menurut Miriam Budiardjo, liberalisme adalah “paham yang mengutamakan kebebasan individu, hak-hak asasi manusia dan kesempatan yang sama bagi setiap orang dalam kehidupan politik maupun ekonomi” (Budiardjo, 2008: 118). Deliar Noer juga menyatakan bahwa “liberalisme merupakan ajaran yang menempatkan kebebasan sebagai nilai utama, terutama dalam bidang ekonomi melalui mekanisme pasar dan persaingan bebas tanpa dominasi negara yang berlebihan” (Noer, 1983: 76). Dalam perkembangannya, liberalisme menjadi landasan bagi lahirnya sistem kapitalisme modern dan mendorong perubahan kebijakan kolonial di berbagai negara Eropa, termasuk Belanda.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa liberalisme merupakan paham yang menempatkan kebebasan individu sebagai nilai utama, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Liberalisme mendorong persaingan bebas, penghormatan terhadap hak-hak individu serta pembatasan campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi. Dalam perkembangannya, paham ini menjadi fondasi bagi lahirnya kapitalisme modern dan turut mempengaruhi perubahan kebijakan kolonial di Eropa, termasuk pergeseran kebijakan Belanda di wilayah kolonialnya.

Pada saat yang bersamaan, Eropa mengalami perubahan mendasar akibat revolusi industri dan berkembangnya paham liberalisme. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada struktur ekonomi, tetapi juga mempengaruhi

arah kebijakan politik negara-negara Eropa, termasuk Belanda. Pemikiran tokoh-tokoh liberal seperti Adam Smith dan John Stuart Mill menekankan pentingnya kebebasan individu serta mekanisme pasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sartono Kartodirdjo dalam bukunya *Pengantar Sejarah Indonesia Baru* menjelaskan bahwa: “dalam konteks kolonial, pemikiran liberal mendorong redefinisi peran negara, dimana aktivitas ekonomi dianggap lebih efektif apabila diserahkan kepada pihak swasta. kemenangan ideologi liberal di Eropa telah membawa perubahan besar dalam pola hubungan antara negara kolonial dan wilayah jajahannya” (Kartodirdjo, 1993: 145).

Pemikiran liberal tersebut mendapat dukungan kuat dari tokoh-tokoh politik liberal di Belanda, seperti Johan Rudolph Thorbecke dan Fransen van de Putte. Tokoh-tokoh ini berpandangan bahwa monopoli negara melalui sistem tanam paksa tidak lagi efisien dan justru menghambat perkembangan ekonomi modern. Pandangan inilah yang kemudian melandasi lahirnya Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) tahun 1870.

Undang-undang ini membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan swasta Eropa untuk menyewa tanah di Hindia Belanda hingga jangka waktu tujuh puluh lima tahun. Hasan Djafar Sjamsuddin menjelaskan bahwa: “*Agrarische Wet* menjadi dasar hukum utama yang memungkinkan masuknya modal swasta dalam skala besar ke wilayah Hindia Belanda. Melalui kebijakan ini, Hindia Belanda secara resmi memasuki babak baru dalam sejarah kolonialnya” (Sjamsuddin, 2012: 112).

Pemberlakuan *Agrarische Wet 1870* menandai berakhirnya era monopoli negara dalam pengelolaan ekonomi kolonial serta dimulainya era kolonialisme liberal. Meskipun secara formal undang-undang ini menyatakan bahwa tanah milik rakyat tidak boleh diperjualbelikan, dalam praktiknya kebijakan tersebut justru membuka peluang luas bagi peralihan penguasaan tanah dari masyarakat adat kepada perusahaan-perusahaan swasta Eropa. Dengan demikian, *Agrarische Wet* tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen kolonial yang mengubah struktur agraria dan relasi kekuasaan di wilayah jajahan. Masuknya paham liberal ke

Hindia Belanda dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kritik moral terhadap sistem tanam paksa, meningkatnya kebutuhan industri Eropa terhadap bahan baku serta kemenangan politik kelompok liberal di parlemen Belanda. Pemerintah kolonial mulai memandang Hindia Belanda sebagai wilayah ekonomi modern yang harus dikelola secara produktif dan efisien. Akses bagi perusahaan-perusahaan Eropa untuk mengembangkan usaha perkebunan kemudian dibuka melalui skema sewa tanah jangka panjang. Kebijakan ini diterapkan terutama di wilayah-wilayah strategis yang memiliki potensi agraria besar, termasuk Palembang.

Palembang dipilih sebagai salah satu wilayah penerapan kebijakan kolonial liberal bukan tanpa alasan. Djohan Hanafiah dalam bukunya *Palembang Zaman Kolonial* menjelaskan bahwa:

Wilayah Palembang dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah serta jaringan sungai yang luas sebagai jalur transportasi dan perdagangan. Sungai Musi beserta anak-anak sungainya menghubungkan wilayah hilir dengan daerah pedalaman, sehingga memudahkan mobilisasi dan distribusi hasil bumi seperti lada, kopi, damar, rotan dan karet. Kondisi geografis dan potensi ekonomi tersebut menjadikan Palembang sebagai wilayah yang strategis bagi pengembangan perkebunan swasta dalam kerangka kebijakan kolonial liberal. Kondisi geografis tersebut menjadikan Palembang sebagai kawasan strategis bagi pengembangan perkebunan swasta dalam kerangka kebijakan kolonial liberal (Hanafiah, 1995: 55).

Selain faktor geografis dan ekonomi, Palembang juga memiliki karakter sosial-politik yang khas dibandingkan wilayah kolonial lainnya. Pasca runtuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1821, struktur kekuasaan lokal mengalami penyesuaian yang signifikan di bawah administrasi kolonial Belanda. Elite-elite lokal yang sebelumnya berperan dalam sistem kesultanan mulai ditempatkan dalam struktur birokrasi kolonial sebagai perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat setempat. Hasan Djafar Sjamsuddin menegaskan bahwa: “integrasi elite lokal merupakan salah satu strategi utama Belanda untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memperkuat kontrol atas daerah jajahan” (Sjamsuddin, 2012: 178).

Kondisi ini menciptakan konfigurasi kekuasaan baru yang sangat mempengaruhi cara kebijakan kolonial liberal diterapkan dan dijalankan di tingkat lokal. Keberadaan masyarakat pedalaman atau Uluu Palembang yang memiliki sistem sosial dan ekonomi berbasis adat juga menjadi faktor penting dalam penerapan kebijakan kolonial liberal. Penguasaan tanah secara komunal dan hubungan masyarakat dengan lingkungan alam sering kali berbenturan dengan kepentingan perusahaan swasta yang berorientasi pada produksi dan keuntungan. Interaksi antara kebijakan agraria kolonial, elite lokal dan masyarakat adat inilah yang menjadikan Palembang sebagai ruang kajian yang penting untuk memahami dinamika kolonialisme liberal secara lebih konkret dan kontekstual.

Pada periode 1870–1900, perusahaan-perusahaan swasta Eropa mulai membuka berbagai usaha perkebunan di wilayah pedalaman Palembang, terutama komoditas karet, kopi dan tembakau. Untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi tersebut, pemerintah kolonial memperkuat struktur administrasi hingga ke daerah Uluu dengan tujuan mengawasi penguasaan lahan, mengatur tenaga kerja serta memperlancar distribusi hasil produksi. Transformasi ekonomi ini membawa dampak yang signifikan terhadap struktur sosial masyarakat Palembang.

Perubahan tersebut ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok sosial baru, seperti mandor perkebunan, buruh upahan, pedagang perantara serta pegawai administrasi kolonial. Bambang Purwanto dalam bukunya *Gagalnya Historiografi Indonesia* menjelaskan bahwa:

Masuknya modal Eropa ke wilayah kolonial menciptakan perubahan mendasar dalam struktur sosial masyarakat karena memperkenalkan relasi baru antara masyarakat lokal dan kekuasaan kolonial. Perubahan ini tercermin dalam pola kerja, penguasaan tanah serta hubungan antara penduduk lokal dengan pihak perusahaan Perkebunan (Purwanto, 2006: 88).

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kolonialisme liberal tidak hanya mengubah perekonomian, tetapi juga merombak tatanan sosial masyarakat Palembang secara menyeluruh. Pandangan tersebut diperkuat oleh Sartono Kartodirdjo yang menyatakan bahwa:” perkembangan

perkebunan modern pada masa kolonial telah melahirkan diferensiasi sosial yang semakin kompleks, ditandai dengan munculnya kelas buruh, elite birokrasi pribumi, serta kelompok perantara ekonomi yang menjadi penghubung antara modal asing dan masyarakat lokal” (Kartodirdjo, 1991: 214).

Dalam pelaksanaan sistem kolonial liberal di Palembang, aparat pemerintah kolonial memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya investasi swasta dan menjaga kepentingan pemerintah Belanda di daerah. *residen* bertugas sebagai pejabat tertinggi pemerintah kolonial di tingkat keresidenan yang mengatur administrasi, keamanan serta pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan swasta. Menurut Sartono Kartodirdjo bahwa: “residen merupakan wakil pemerintah kolonial yang bertanggung jawab menjaga stabilitas politik dan kelancaran aktivitas ekonomi di daerah jajahan” (Kartodirdjo, 1993: 148).

Sementara itu, kontrolir bertugas melakukan pengawasan langsung di lapangan, terutama terhadap pelaksanaan kebijakan kolonial di wilayah pedalaman. Kontrolir berhubungan langsung dengan masyarakat lokal mengawasi penggunaan tanah, tenaga kerja serta distribusi hasil perkebunan. Hasan Djafar Sjamsuddin menjelaskan bahwa: “kontrolir menjadi penghubung utama antara pemerintah kolonial dengan masyarakat pribumi dalam menjalankan administrasi kolonial di tingkat lokal” (Sjamsuddin, 2012: 180).

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *residen* dan kontrolir memiliki peranan penting dalam pelaksanaan sistem kolonial liberal karena keduanya menjadi alat pemerintah kolonial dalam mengawasi investasi swasta, mengendalikan administrasi serta menjaga stabilitas kekuasaan kolonial di Palembang.

Pemerintah Belanda juga memanfaatkan elite lokal untuk memperkuat pelaksanaan sistem kolonial liberal di Palembang. Bupati dan pasirah dijadikan perantara antara pemerintah kolonial dengan masyarakat pribumi, terutama dalam urusan pengawasan masyarakat, pengumpulan pajak serta pengaturan tenaga kerja. Menurut Djohan Hanafiah bahwa: “elite lokal di Palembang tetap dipertahankan oleh pemerintah kolonial karena memiliki

pengaruh besar terhadap masyarakat adat dan dianggap mampu menjaga ketertiban daerah” (Hanafiah, 1995: 59).

Pasirah sebagai kepala marga di daerah pedalaman memiliki peranan penting dalam membantu pemerintah kolonial mengawasi masyarakat Uluan. Mereka bertugas menyampaikan kebijakan kolonial kepada masyarakat serta menjaga hubungan antara perusahaan perkebunan dengan penduduk lokal. Bambang Purwanto menjelaskan bahwa: “keterlibatan elite pribumi dalam birokrasi kolonial menunjukkan adanya kerja sama antara kekuasaan kolonial dan penguasa lokal dalam mempertahankan sistem ekonomi kolonial” (Purwanto, 2006: 91).

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kolonial memanfaatkan elite lokal sebagai perantara untuk memperkuat kontrol terhadap masyarakat Palembang. Melalui peran bupati, pasirah dan elite adat lainnya, kebijakan kolonial liberal dapat dijalankan lebih efektif sekaligus memperluas pengaruh kekuasaan Belanda hingga ke daerah pedalaman.

Kondisi tersebut menumbuhkan ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan sistem kolonial liberal di Palembang pada periode 1870–1900. Ketertarikan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa kebijakan kolonial liberal tidak hanya membawa perubahan dalam bidang ekonomi melalui berkembangnya perkebunan dan pertambangan, tetapi juga memengaruhi sistem pemerintahan kolonial, struktur sosial masyarakat, serta hubungan antara pemerintah kolonial, elite lokal, dan masyarakat pribumi. Selain itu, Palembang memiliki karakteristik geografis, ekonomi, dan sosial yang berbeda dengan daerah lain di Hindia Belanda sehingga menarik untuk dikaji sebagai bagian dari dinamika kolonialisme liberal di tingkat lokal.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penetrasi kapitalisme kolonial tidak hanya mengubah struktur ekonomi, tetapi juga merekonstruksi tatanan sosial masyarakat pribumi secara menyeluruh. Meskipun Palembang memiliki peran penting dalam struktur ekonomi kolonial, kajian mengenai pelaksanaan sistem kolonial liberal di wilayah ini masih relatif terbatas. Penelitian sejarah tentang Palembang umumnya lebih banyak berfokus pada masa Kesultanan,

perlawanan terhadap kolonialisme Belanda atau perkembangan kota pada abad ke-20. Sementara itu, kajian mengenai kolonialisme liberal cenderung menyoroti wilayah Jawa dan Sumatera Timur sebagai pusat utama perkebunan besar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang cukup jelas, yaitu minimnya kajian yang secara khusus meneliti penerapan kebijakan kolonial liberal di Palembang pada periode 1870–1900 beserta dampaknya terhadap masyarakat lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik yang kuat. Periode 1870–1900 merupakan fase transisi yang menentukan arah perkembangan sosial dan ekonomi Palembang di bawah sistem kolonial liberal. Penelitian ini tidak hanya menelaah bagaimana kebijakan kolonial diterapkan di tingkat lokal, tetapi juga mengkaji respons masyarakat Palembang terhadap perubahan tersebut, baik melalui proses adaptasi maupun bentuk-bentuk resistensi dalam skala terbatas. Dengan pendekatan mikrohistoris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kolonialisme liberal di Palembang.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus membahas pelaksanaan sistem kolonial liberal di Keresidenan Palembang pada kurun waktu 1870–1900 melalui pendekatan sejarah lokal. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas politik kolonial liberal dalam lingkup nasional atau berfokus pada daerah Jawa dan Sumatera Timur, penelitian ini mengkaji secara lebih spesifik bagaimana kebijakan liberal diterapkan di Palembang, termasuk keterkaitannya dengan perkembangan perkebunan, pertambangan, administrasi kolonial, peranan elite lokal, serta perubahan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan historiografi lokal Palembang sekaligus memperkaya kajian mengenai implementasi sistem kolonial liberal di luar Pulau Jawa.

B. Pembatasan Masalah

Untuk mencapai titik fokus dalam penelitian, diperlukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini di bedakan menjadi dua batasan yaitu Batasan spatial(wilayah) dan Batasan temporal (waktu).

1. **Batasan Spatial (Batasan wilayah):** Area yang dikaji mencakup Keresidenan Palembang, termasuk kota Palembang dan wilayah sekitarnya yang menjadi pusat aktivitas kolonial, seperti daerah perkebunan swasta pada masa kolonial liberal terutama berkembang di daerah sepanjang aliran Sungai Musi dan anak-anak sungainya, karena sungai berfungsi sebagai jalur transportasi utama hasil bumi. Daerah-daerah tersebut meliputi Musi Ilir dan Musi Ulu, termasuk wilayah yang kini dikenal sebagai Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu serta pertambangan di daerah Muara Enim dan sekitarnya, khususnya di kawasan Tanjung Enim untuk kebutuhan industri dan transformasi.
2. **Batasan Temporal (Batasan waktu):** Fokus kajian berada pada rentang waktu antara tahun 1870-1900. 1870 merupakan titik awal diberlakukannya Undang-Undang Agraria yang menandai berakhirnya sistem tanam paksa dan di mulainya kebijakan kolonial liberal di Palembang, yang memberikan peluang bagi pihak swasta menanamkan modalnya melalui usaha perkebunan di Palembang. Sementara itu akhir tahun 1900 merupakan priode ini pelaksanaan kolonial liberal telah menunjukkan perkembangan baik dari peluasan perkebunan maupun dalam pakannya terhadap masyarakat lokal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi diberlakukannya sistem kolonial liberal di Palembang 1870-1900?
2. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah kolonial terhadap pembukaan investasi swasta di Palembang?

3. Bagaimana peran pemerintah kolonial dan elit lokal dalam mendukung sistem liberal di Palembang?
4. Bagaimana dampak dari pelaksanaan sistem liberal terhadap kehidupan politik, ekonomi dan sosial masyarakat Palembang pada saat itu?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan sistem kolonial liberal di Palembang 1870–1900 serta pengaruhnya terhadap masyarakat lokal dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis diberlakukannya sistem kolonial liberal 1870-1900 di Palembang.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kebijakan pemerintah kolonial terhadap pembukaan investasi swasta di Palembang.
3. Untuk menganalisis peran pemerintah kolonial dan elit lokal dalam mendukung sistem liberal di Palembang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pelaksanaan sistem liberal terhadap kehidupan politik, ekonomi dan sosial masyarakat Palembang pada saat itu.

E. Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang sejarah kolonial dan ekonomi, selain itu penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai penerapan sistem kolonial liberal di Indonesia serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penambahan sistem ekonomi liberal dari tanam paksa ke sistem liberal.

2. Secara Praktis:

- a) Bagi peneliti: Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan sistem kolonial liberal di Palembang serta dampaknya terhadap masyarakat lokal.
- b) Bagi mahasiswa/akademis: Sebagai bahan referensi dan sumber belajar dalam memahami Sejarah ekonomi kolonial khususnya terkait tentang pelaksanaan sistem kolonial liberal di Palembang serta dampaknya terhadap masyarakat.
- c) Bagi masyarakat umum: Memberikan pemahaman historis mengenai sejarah lokal Palembang, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan dampak kebijakan kolonial terhadap kehidupan masyarakat Palembang.
- d) Bagi dunia Pendidikan: Dapat digunakan sebagai bahan ajar atau sumber pembelajaran Sejarah khususnya pada materi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia.

A. Definisi Istilah

Berdasarkan judul penelitian mengenai *Pelaksanaan Sistem Kolonial Liberal 1870-1900 di Palembang*, maka peneliti dapat mendeskripsikan daftar istilah untuk menerangkan beberapa kata atau kalimat yang membutuhkan pemahaman secara mendalam agar memudahkan dan tidak terjadi kesalahan penafsiran, maka peneliti memberikan penjelasan secara singkat. Definisi istilah tersebut diperoleh dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia 2016* (KBBI) yang diterbitkan oleh *Badan dan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa* dan diperoleh juga dari *Kamus Sejarah Indonesia (2011)* karya Eko Sujatmiko. Adapun kata atau kalimat yang dimaksud Adalah sebagai berikut:

- Administrasi Kolonial* : Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh negara penjajah di wilayah jajahan.
- Agrarische Wet* : Undang-undang pertanian kolonial Belanda yang diterapkan di Hindia Belanda untuk

	<i>mengatur kepemilikan tanah dan hak-hak pertanian</i>
<i>Birokrasi</i>	: <i>Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai berdasarkan aturan dan prosedur</i>
<i>Cultuurstelsel</i>	: <i>Sistem tanam paksa Belanda di Hindia Belanda (1830–1870), dimana petani diwajibkan menanam tanaman ekspor untuk kepentingan pemerintah kolonial.</i>
<i>Diferensiasi Sosial</i>	: <i>Perbedaan masyarakat secara horizontal berdasarkan ciri tertentu.</i>
<i>Elite Lokal</i>	: <i>Kelompok masyarakat setempat yang memiliki kekuasaan atau pengaruh dalam struktur sosial.</i>
<i>Eksplorasi</i>	: <i>Pemanfaatan secara berlebihan terhadap suatu sumber daya untuk keuntungan tertentu.</i>
<i>Ideologi liberal</i>	: <i>Sistem gagasan yang menekankan kebebasan individu serta pembatasan campur tangan negara.</i>
<i>Imperialisme</i>	: <i>Kebijakan memperluas kekuasaan suatu negara ke wilayah lain.</i>
<i>Implikasi</i>	: <i>Sesuatu yang tersirat atau yang dapat ditarik dari suatu pernyataan atau perbuatan; konsekuensi.</i>
<i>Integrasi</i>	: <i>Proses pembauran atau penyatuan menjadi satu kesatuan.</i>
<i>Investasi</i>	: <i>Penanaman modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.</i>
<i>Kapitalisme</i>	: <i>Sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan modal oleh individu atau swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan.</i>
<i>Kebijakan colonial</i>	: <i>Peraturan atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah penjajah dalam mengatur wilayah jajahan.</i>

<i>Kolonial</i>	:	<i>Sistem penguasaan suatu wilayah oleh negara asing untuk kepentingan politik dan ekonomi penjajah.</i>
<i>Kolonialisme</i>	:	<i>Sistem penguasaan suatu wilayah oleh negara lain untuk kepentingan politik dan ekonomi.</i>
<i>Komoditas</i>	:	<i>Barang dagangan utama yang memiliki nilai ekonomi.</i>
<i>Liberal</i>	:	<i>Suatu paham atau ideologi yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial.</i>
<i>Liberalisme</i>	:	<i>Paham yang menekankan kebebasan individu dalam bidang politik, ekonomidan sosial.</i>
<i>Max Havelar</i>	:	<i>Karya sastra yang mengkritik praktik penindasan dalam sistem tanam paksa di Hindia Belanda.</i>
<i>Mikro Historis</i>	:	<i>Pendekatan sejarah yang mengkaji peristiwa secara mendalam dalam lingkup kecil atau lokal.</i>
<i>Modal asing</i>	:	<i>Modal yang berasal dari luar negeri dan digunakan untuk kegiatan ekonomi di suatu wilayah</i>
<i>Modernisasi</i>	:	<i>Proses perubahan dari keadaan tradisional menuju keadaan yang lebih maju.</i>
<i>Modal swasta</i>	:	<i>Modal yang dimiliki oleh pihak perseorangan atau perusahaan nonpemerintah</i>
<i>Otoritas</i>	:	<i>Kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atau lembaga.</i>
<i>Pelaksanaan</i>	:	<i>Tindakan melaksanakan; penerapan suatu peraturan atau program.</i>
<i>Pelaksanaan Sistem Kolonial Liberal</i>	:	<i>Penerapan kebijakan kolonial Belanda yang mengutamakan liberalisasi ekonomi dan perdagangan di Hindia Belanda pada abad ke-19.</i>

<i>Penetrasi kekuasaan</i>	: <i>Masuk dan meluasnya pengaruh kekuasaan ke dalam suatu wilayah atau kelompok</i>
<i>Penetrasi modal</i>	: <i>Masuknya modal ke suatu wilayah untuk menguasai atau memanfaatkan kegiatan ekonomi.</i>
<i>Politik Etis</i>	: <i>Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi melalui pendidikan, irigasi dan transmigrasi.</i>
<i>Redefinisi</i>	: <i>Proses mendefinisikan kembali suatu konsep, peran, kebijakan atau pemahaman agar sesuai dengan kondisi, pemikiran atau tujuan yang baru.</i>
<i>Resistensi</i>	: <i>Perlawanan terhadap suatu kekuasaan atau perubahan.</i>
<i>Revolusi</i>	: <i>Perubahan yang berlangsung secara cepat dan mendasar dalam suatu bidang kehidupan.</i>
<i>Revolusi industri</i>	: <i>Perubahan besar dalam bidang industri yang ditandai dengan penggunaan mesin dan teknologi dalam proses produksi.</i>
<i>Sistem</i>	: <i>Susunan unsur yang saling berhubungan atau bekerja sama; cara yang teratur dalam melakukan sesuatu.</i>
<i>Transformasi</i>	: <i>Perubahan bentuk, sifat atau fungsi menjadi bentuk yang baru.</i>

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, T. (1987). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdullah, T. (1987). *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdurahman, D. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Abdurahman, D. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Abdurrahman, D. (2002). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Aditya, F., Songkup Pratama, R., Siagian, S. Z., Daely, V. G., & Yunita, S. (2024). Pengaruh Kolonialisme terhadap Struktur Sosial dan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 8(2).
- Aldi, H., Irwan, M. H. D., Syarifuddin, & Supriyanto. (2021). Sistem pemerintahan *Onder Afdeeling* Ogan Ilir tahun 1906–1942. Candrasangkala: *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 7(2), 93–106.
- Ardianti, Rehardini Dwi. (2021). *Peranan Mayor Jenderal TNI (Purn) Raden Mohamad Mangoendiprodjo dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Surabaya Tahun 1945–1949* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asrul, A. A., Sianturi, D. F., Tarigan, A. E., Sihotang, M., & Sinaga, R. (2024). Konstruksi Rasial Masyarakat Indonesia pada Masa Kolonial. *Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi*, 1(2). <https://doi.org/10.57235/jahe.v1i2.3930>Badan

- Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Boediono, M. (2016). *Ekonomi Indonesia: Dalam lintasan sejarah*. Bandung: Mizan.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Farida. (2009). Perekonomian Kesultanan Palembang. *Jurnal Sejarah Lontar*, 6(1), 12–20.
- Fatmah. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hadi, S. (2015). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hanafiah, D. (1995). *Palembang zaman kolonial*. Palembang: Pemerintah Kota Palembang.
- Hanafiah, J. (1995). *Sejarah Palembang sejak zaman Sriwijaya sampai zaman kolonial*. Palembang: Pemerintah Kota Palembang.
- Harisnur. (2022). *Kamus Istilah Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Herlina, Nina. (2008). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Hidayat, A. A., Fikri Arsyad, M., Nurcahya, Y., & Thariq Syah, M. K. (2024). Masa Kolonialisme Kawasan Asia Tenggara. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.59757/sharia.v1i2.39>
- Irwanto, D. (2017). *Malaise dan lambang kekayaan ekonomi penguasa lokal di Palembang 1929–1942*. *Lembaran Sejarah*, 13(1), 48–71.
- Irwanto, Dedi., & Alian Sair. (2014). *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Ismaun. (1996). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung.
- Ismaun. (2007). *Pengantar Belajar Sejarah sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*. Bandung: Historia Utama Press.
- Kartodirdjo, S. (1987). *Pengantar sejarah Indonesia baru 1500–1900: Dari emporium sampai imperium*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, S. (1991). *Pengantar sejarah Indonesia baru: 1500–1900, Jilid 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pengantar sejarah Indonesia baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (1995). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Manalu, J., Azhari, N., Hayani, R., Batubara, R. S., & Harefa, M. P. (2025). Analisis Faktor Pendorong Penjelajahan Samudra Bangsa Eropa Abad Ke-15–17 Serta Dampaknya Terhadap Perdagangan di Nusantara. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 3(2). <https://doi.org/10.57235/jerumi.v3i2.7671>
- Masyrullahushomad, & Sudrajat. (2019). Penerapan *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode awal swastanisasi perkebunan di Pulau Jawa. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 7(2), 159–174.
- Miftakhuddin. (2019). Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan menuju Hegemoni. Jejak. https://www.researchgate.net/publication/335754327_Kolonialisme_Eksploitasi_dan_Pembangunan_menuju_Hegemoni
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muttaqin, E. Z., & Zaini, A. (2021). Kebijakan Hukum *Vrijwillige Orderwepping* Dan *Toepasselijk Verklaring* Sebagai Unifikasi Pemerintah Hindia Belanda. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art10>
- Naibaho, A. K., Devi, C. S., Manurung, M. N., Simanullang, M., Simanjuntak, T. Y., Sinurat, N. S., & Nasution, S. (2025). Dampak Kolonialisme Bangsa Barat Terhadap Perkembangan Sosial Dan Ekonomi Di Asia Tenggara. *Jurnal*

- Intelek Insan Cendikia*, 2(12), 18207–18213.
<https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/5623>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noer, D. (1983). *Pengantar ke pemikiran politik*. Jakarta: Rajawali.
- Notosusanto, N. (1971). *Norma-Norma Dasar Penelitian Sejarah*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.
- Nugraha, S. (2005). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Nurchahya, Y., Sugiarto, D., Kautsar, M., Syah, T., Sejarah, M., Islam, P., Sunan, U., & Djati, G. (2025). Perkembangan Kota Bandung pada Masa kolonial Abad ke-19. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, 1(1).
- Nurmalasyari, N., Wulandari, N., & Amalia Putri, W. (2024). TRANSFORMASI MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN BANGSA BARAT. SEMAR: *Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4).
<https://doi.org/10.59966/semar.v2i4.1317>
- Panji, K. A. R., & Suriana, S. (2014). Sejarah Keresidenan Palembang. Tamaddun: *Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 14(2), 129–146.
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. (1996). *Sejarah perkembangan pemerintahan di daerah Sumatera Selatan*. Palembang: Pemprov Sumsel.
- Purwanto, B. (2006). *Gagalnya historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Rachman, N. F. (2012). *Land reform dari masa ke masa*. Yogyakarta: Tanah Air Beta & Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Rahmawati, L., Iswati, & Sutiyah. (2023). Perlawanan Mas Macro Kartodikromo Terhadap Pemerintah Kolonial Belanda Melalui Pers (1911-1926). *Jurnal Candi*, 23(2).
- Regering van Nederlandsch-Indië. (1907, 1922). *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Regering van Nederlandsch-Indië. (1910). *Koloniaal verslag: Laporan pemerintahan Hindia Belanda*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

- Romualdi, K. B. (2023). Telaah Perubahan Stratifikasi Sosial Masyarakat Banten Sebelum Pemberontakan Tahun 1888. Keraton: *Journal of History Education and Culture*, 5(1).
<https://doi.org/10.32585/keraton.v5i1.4218>
- Sabrina, D. A., Utami, A. P., Aman, & Basyari, A. (2023). Batavia dalam Rongrongan Kolonialisme Belanda Melalui VOC Abad ke XVII – XIX. PERIODE: *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 5(2).
<https://doi.org/10.21009/periode.052.4>
- Salempa, B. I., & Seniwati, S. (2024). Diplomasi Maritim “Rempah” di Nusantara: Perjalanan dari Maluku Sampai ke Pelabuhan Malaka. *Journal of Creative Student Research*, 2(6), 71–84.
<https://doi.org/10.55606/JCSR-POLITAMA.V2I6.4571>
- Salma, R., Dewi, R., Wulandari, L., & Putra, P. (2024). Pengaruh Politik Etis Kolonial Belanda Terhadap Pertanian dan Ekonomi Lokal di Lampung. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 6(2).
<https://doi.org/10.26740/ijss.v6n2.p180-191>
- Sari, R. A. W. (2015). Pelaksanaan Pajak Minuman Keras Di Jambi Tahun 1885-1936. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(2).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/11929>
- Semit, M. E., & Pandor, P. (2025). Refleksi Filosofis Transformasi Menuju Masyarakat Terbuka: Wawasan Liberalisme Indonesia Perspektif Francis Fukuyama. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(1).
<https://doi.org/10.23887/jfi.v8i1.76009>
- Sihotang, E. C., Fahrurozi, M., Damanik, M. F., Pardosi, C. S., & Flores, T. (2026). Dampak Kolonialisme Belanda Terhadap Kehidupan Sosial - Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(01), 20–29. <https://doi.org/10.23969/JPV11I01.43236>
- Simbolon, P. T. (2006). *Menjadi Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Sjamsuddin, H. D. (2012). *Sejarah nasional Indonesia Jilid IV: Indonesia abad ke-19*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sjamsuddin, Helius. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

- Staatsblad van Nederlandsch-Indië*. (1906–1907). *Staatsblad No. 93 (1906), No. 466 (1906), dan No. 528 (1907)*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujatmiko, E. (2011). *Kamus sejarah Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistyo, B. (1995). *Pemogokan Buruh Sebuah kajian Sejarah*. Tiara Wacana.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. (2002). *Pengantar Penelitian Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Susetyo, B., & Ravico. (2021). Perekonomian masyarakat *Onder Afdeeling Moesi Oeloe* tahun 1900–1942. Rihlah: *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 9(2), 13–35.
- Susilo, A., & Sarkowi. (2019). Perubahan sosial ekonomi masyarakat Surulangun pasca menjadi ibu kota *Onder Afdeling Rawas* 1901–1942. *Diakronika*, 19(1), 1–11.
- Suwignyo, A. (2006). *Pengantar Geografi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Syahbuddin, S. (2018b). Involusi Pertanian Di Jawa 1830-1900 dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan IPS*, 8(1), 11–20. <https://doi.org/10.37630/JPI.V8I1.113>
- Syahbuddin. (2018). Involusi Pertanian Di Jawa 1830-1900 dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ips*, 8(1). <https://doi.org/10.37630/jpi.v8i1.113>
- Syawaludin, M. (2015). Pengelolaan sistem sosial marga di Sumatera Selatan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(1), 175–198.
- Tasnur, I., Apriyanto, J., & Arrazaq, N. R. (2022). Liberalisme dan monetisasi ekonomi di Hindia Belanda (1870–1900). Keraton: *Journal of History Education and Culture*, 4(2), 71–78.

- Tri, S. A., Saputra, M. R., & Yustina, S. E. (2023). Sistem Ekonomi Liberal pada Masa Kolonial di Pedesaan. *Jurnal Edukasi IPS*, 6(2). <https://doi.org/10.21009/eips.006.02.06>
- Wargadalem, F. R., & Susanti, H. (2023). Pasar 16 Ilir: Ruang perdagangan di Kota Palembang awal abad 20. *Diakronika*, 23(1), 137–157.
- Wargadalem, F. R., & Utama, N. J. (2024). Dampak krisis Malaise terhadap sektor perkebunan di Keresidenan Palembang 1929–1934. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 9(1), 10–18.
- Wellan, J. W. J. (1932). Zuid-Sumatra: *Economisch overzicht*. (Dikutip dalam Zubir, 2015).
- Wihardyanto, D., & Rahmi, D. H. (2020). Pengaruh Kolonialisasi Belanda Di Kawasan Pusat Kota Pulau Jawa: Sebuah Kajian Literatur. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 7(1). <https://doi.org/10.24252/nature.v7i1a2>
- Wirawan, W. (2011). Semaun dalam Bayang-Bayang Pemerintah Hindia Belanda 1899-1923. *Paramita: Historical Studies Journal*, 21(2).
- Zubir, Z. (2015). Sejarah perkebunan dan dampaknya bagi perkembangan masyarakat di *Onder Afdeeling* Banyuasin dan Kubu, Keresidenan Palembang 1900–1942. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 1(1), 79–101